

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tinjauan pustaka yang menjadi dasar dalam penyusunan kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis. Penyajiannya dibagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu: pertama, uraian mengenai tinjauan pustaka yang menjelaskan konsep dasar dari variabel-variabel yang diteliti; kedua, pembahasan mengenai penelitian terdahulu yang relevan; dan ketiga, penyusunan kerangka pemikiran serta hipotesis yang diajukan.

2.1.1 Pengangguran

2.1.1.1 Pengertian Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah serius yang kerap dialami banyak negara, khususnya negara berkembang. Menurut data BPS (2010), pengangguran didefinisikan sebagai penduduk yang sedang berupaya mendapatkan pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau masyarakat yang belum memerlukan pekerjaan maupun individu yang telah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Menurut Sukirno (2006) mendefinisikan pengangguran sebagai kondisi ketika seseorang telah masuk usia angkatan kerja tetapi belum memperoleh pekerjaan.

Menurut muslim (2014), pengangguran merupakan kondisi tanpa pekerjaan yang dialami sebagian angkatan kerja yang aktif mencari namun belum memperoleh pekerjaan. Fenomena pengangguran (*Unemployment*) hampir selalu hadir dalam setiap sistem perekonomian, khususnya di negara berkembang seperti

Indonesia. Secara umum, pengangguran diartikan sebagai ketidakmampuan angkatan kerja dalam mendapatkan pekerjaan sesuai kebutuhan dan keinginan mereka. Tingkat perkembangan pengangguran di suatu negara dapat diukur melalui tingkat pengangguran terbuka (TPT). Semakin tinggi angka pengangguran menunjukkan semakin banyak penduduk usia produktif yang belum bekerja. Secara umum, tingkat pengangguran dihitung dengan membandingkan jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja, yang dinyatakan dalam bentuk persentase, sebagaimana rumus berikut:

$$TPT = \frac{\text{jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$$

2.1.1.2 Jenis- Jenis Pengangguran

Menurut Muslim (2014) beberapa jenis pengangguran:

a. Pengangguran normal atau friksional

Apabila suatu perekonomian memiliki tingkat pengangguran sekitar dua hingga empat persen dari total angkatan kerja, keadaan ini disebut kesempatan kerja penuh (*full employment*). Pengangguran sebesar itu dipandang sebagai pengangguran normal atau friksional.

b. Pengangguran struktural

Jenis ini muncul akibat perubahan struktur aktivitas ekonomi. Tidak semua industri dan perusahaan di suatu negara terus berkembang, beberapa mengalami kemunduran yang menurunkan produksi sehingga memaksa pemutusan hubungan kerja dan menciptakan penganggur.

c. Pengangguran siklikal

Terjadi karena penurunan harga komoditas primer (bahan baku industri) yang menyebabkan produksi komoditas ikut menurun. Penurunan harga ini berkaitan dengan permintaan luar negeri yang lesu, sehingga output perusahaan berkurang dan berujung pada pemutusan tenaga kerja (Rahardja, 2006).

d. Pengangguran musiman

Berhubungan erat dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, utamanya di sektor pertanian. Contohnya, petani umumnya menganggur di luar musim tanam dan panen hingga musim berikutnya tiba.

e. Pengangguran teknologi

Disebabkan oleh transformasi teknologi dari sederhana ke modern. Pergantian tenaga manusia dengan mesin mengakibatkan pemutusan hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan.

f. Pengangguran politik

Kondisi ini timbul akibat kebijakan pemerintah yang secara langsung maupun tidak memengaruhi terjadinya pengangguran.

g. Setengah penganggur

Kelompok pekerja yang termasuk dalam kategori setengah penganggur adalah mereka yang memiliki durasi kerja (dalam hitungan hari, jam, atau minggu) di bawah kapasitas normal yang seharusnya dapat dikerjakan.

h. Pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka terbagi menjadi dua jenis:

- Pengangguran sukarela: Angkatan kerja yang memilih tidak bekerja karena menolak tingkat upah tertentu atau menantikan pekerjaan yang lebih baik.
- Pengangguran terpaksa: Angkatan kerja yang bersedia bekerja namun belum memperoleh pekerjaan.

2.1.1.3 Penyebab Pengangguran

Terbatasnya jumlah lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Rendahnya tingkat keterampilan yang dimiliki oleh sebagian besar pencari kerja sehingga tidak memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Keterbatasan akses terhadap informasi ketenagakerjaan, di mana banyak pencari kerja tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja baru. Distribusi kesempatan kerja yang belum merata, dengan konsentrasi lapangan pekerjaan yang lebih banyak di wilayah perkotaan dibandingkan daerah pedesaan.

Upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan *soft skills* tenaga kerja masih belum berjalan secara maksimal. Adanya kecenderungan perilaku kurang produktif di kalangan pencari kerja, yang ditandai dengan sikap mudah menyerah dan rendahnya motivasi dalam mencari pekerjaan.

2.1.1.4 Dampak Pengangguran

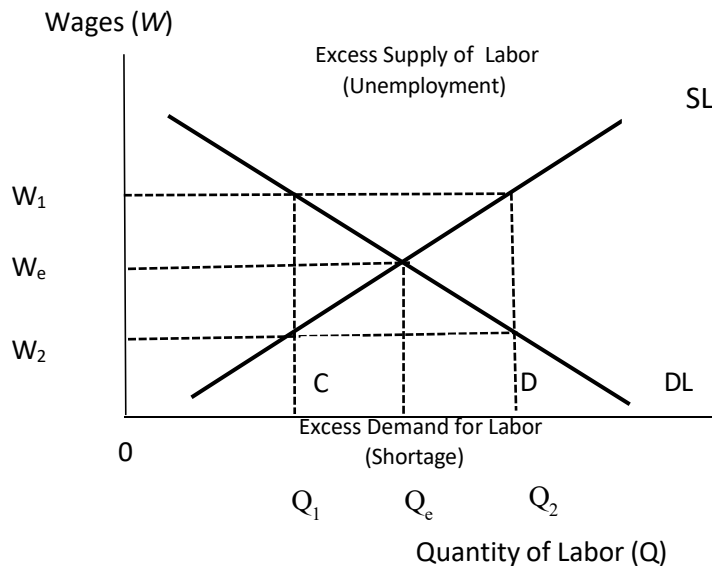
Menurut Nanga (2001), pengangguran membawa dampak kepada individu maupun masyarakat, yaitu:

- a. Hilangnya penghasilan dan mata pencaharian individu.
- b. Pengurangan atau hilangnya keterampilan yang dimiliki oleh individu karena tidak digunakan secara aktif.
- c. Potensi memicu ketidakstabilan sosial dan politik, karena menurunnya aktivitas ekonomi dan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap pemerintah yang berkuasa.

2.1.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka didefinisikan sebagai rasio antara jumlah penganggur dengan total angkatan kerja (Indayani & Hartono 2020). Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan perekonomian suatu wilayah dalam menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi angka tersebut, maka semakin besar indikasi adanya ketidaksesuaian baik dari sisi penawaran maupun permintaan tenaga kerja (Laia & Ashar, 2023).

2.1.1.6 Teori Pengangguran



Sumber : Maimun Sholeh (2005)

Gambar 2.1 Kurva Pasar Tenaga Kerja

a. Teori Pasar Tenaga Kerja

Menurut Mankiw, N. G. (2016) dalam bukunya *Macroeconomics* (9th ed.) bahwa pengangguran terjadi ketika tingkat upah berada di atas tingkat upah keseimbangan pasar tenaga kerja, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh rumah tangga melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan, yang pada akhirnya menimbulkan kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply of labor*).

Gambar tersebut menggambarkan mekanisme pasar tenaga kerja dalam perspektif teori ekonomi klasik dan neoklasik yang menjelaskan hubungan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja. Sumbu vertikal menunjukkan tingkat upah (W), sedangkan sumbu horizontal menunjukkan jumlah tenaga kerja (Q).

Kurva *Supply of Labor* (SL) merepresentasikan penawaran tenaga kerja dari rumah tangga, sementara kurva *Demand of Labor* (DL) menunjukkan permintaan tenaga kerja oleh perusahaan. Menurut Mankiw (2016), permintaan tenaga kerja ditentukan oleh produktivitas marjinal tenaga kerja, sedangkan penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah yang berlaku di pasar tenaga kerja.

Titik perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja menunjukkan kondisi keseimbangan pasar tenaga kerja, yaitu pada tingkat upah keseimbangan (W_e) dan jumlah tenaga kerja keseimbangan (Q_e). Pada kondisi ini, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, sehingga tidak terdapat kelebihan maupun kekurangan tenaga kerja.

Menurut Mankiw (2016) menjelaskan bahwa keseimbangan pasar tenaga kerja tercapai ketika upah mampu menyesuaikan secara fleksibel sesuai dengan mekanisme permintaan dan penawaran. Namun, apabila tingkat upah berada di atas tingkat upah keseimbangan, yaitu pada tingkat W^1 , jumlah tenaga kerja yang ditawarkan meningkat menjadi Q_2 , sementara jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan menurun menjadi Q_1 . Kondisi ini menimbulkan kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply of labor*) yang ditunjukkan oleh selisih antara titik A dan B. Menurut Mankiw (2016), kelebihan penawaran tenaga kerja tersebut mencerminkan terjadinya pengangguran, yang disebabkan oleh ketidakfleksibelan upah untuk turun kembali ke tingkat keseimbangan pasar. Sebaliknya, apabila tingkat upah berada di bawah tingkat keseimbangan, yaitu pada tingkat W^2 , maka jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan meningkat menjadi Q_2 , sedangkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan hanya

sebesar Q_1

Kondisi ini menyebabkan terjadinya kelebihan permintaan tenaga kerja (*excess demand for labor*) atau kekurangan tenaga kerja (*shortage*), sebagaimana ditunjukkan oleh area antara titik C dan D. Mankiw (2016) menyatakan bahwa kondisi kekurangan tenaga kerja mendorong tekanan kenaikan upah hingga pasar kembali mencapai keseimbangan.

2.1.2 Industri

2.1.2.1 Pengertian Industri

Industri merupakan suatu aktivitas ekonomi yang berorientasi pada proses pengolahan bahan mentah, bahan baku, maupun barang setengah jadi menjadi produk baru yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, industri tidak hanya dipahami sebagai kegiatan produksi semata, melainkan juga mencakup aktivitas rancang bangun, perekayasaan, serta jasa penunjang yang mendukung peningkatan produktivitas nasional. Sejalan dengan itu, Badan Pusat Statistik BPS (2017) mendefinisikan industri sebagai unit produksi yang mengubah bahan baku dengan memanfaatkan tenaga kerja maupun teknologi menjadi barang atau jasa yang siap digunakan oleh konsumen akhir. Dengan demikian, industri dapat dipandang sebagai sektorstrategis yang berperan dalam menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya saing suatu negara.

2.1.2.2 Klasifikasi Industri

Menurut Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 19/M/I/1986,

industri diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Jenis industri berdasarkan jumlah modal/ investasi dibedakan menjadi:
 - a. Industri Kecil : Modal/ investasi paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
 - b. Industri Menengah : Modal/ investasi antara Rp 1.000.000.000 – Rp 15.000.000.000.
 - c. Industri Besar : Modal/ investasi lebih dari Rp 15.000.000.000.
2. Jenis industri berdasarkan jumlah tenaga kerja, industri dibedakan menjadi:
 - a. Industri rumah tangga, adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 1-4 orang.
 - b. Industri kecil, adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 5-19 orang.
 - c. Industri sedang atau industri menengah, adalah industri yang jumlah karyawan /tenaga kerja berjumlah antara 20-99 orang.
 - d. Industri besar, adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 100 orang atau lebih.

Klasifikasi ini sejalan dengan sistem Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang digunakan oleh BPS sebagai acuan resmi dalam penyusunan data ekonomi nasional. Melalui pengelompokan tersebut, pemerintah dapat menilai skala usaha, kebutuhan dukungan modal, serta kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga kebijakan pengembangan industri dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran.

2.1.2.3 Inovasi dan Teknologi dalam Industri

Perkembangan industri modern tidak dapat dilepaskan dari peran inovasi teknologi. Era Industri 4.0 ditandai dengan penerapan sistem otomatisasi, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), *Internet of Things (IoT)*, serta pemanfaatan big data yang mampu meningkatkan efisiensi proses produksi sekaligus mengurangi dampak lingkungan (Javaid, M., et al 2022).

Penelitian Shahin, M (2023) menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dalam sektor manufaktur dapat meningkatkan produktivitas hingga tiga puluh persen melalui penerapan sistem otomatisasi. Selain itu, penerapan teknologi *predictive maintenance* berbasis AI memungkinkan perusahaan mendeteksi potensi kerusakan mesin sebelum terjadi, sehingga dapat menekan biaya perawatan dan mengurangi waktu henti produksi. Menurut Misel (2023), inovasi digital juga mendorong transformasi industri menuju keberlanjutan dengan memanfaatkan energi terbarukan dan sistem produksi yang ramah lingkungan. Dengan demikian, inovasi teknologi tidak hanya berfungsi sebagai pendorong efisiensi dan daya saing, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

2.1.2.4 Teori Industri

a. Teori Kewirausahaan dan UMKM

Dalam kerangka teori kewirausahaan, UMKM dipahami sebagai wujud konkret praktik kewirausahaan yang berkembang di masyarakat. Kewirausahaan diartikan sebagai kemampuan individu dalam menciptakan nilai tambah melalui

inovasi, kreativitas, serta keberanian mengambil risiko di tengah ketidakpastian ekonomi. Menurut Schumpeter (1934) dalam Mulyana (2023) menyatakan bahwa wirausaha berfungsi sebagai agen pembaruan yang mendorong dinamika pertumbuhan ekonomi melalui proses inovasi. Jika dikaitkan dengan UMKM, teori ini menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku yang terlibat dalam usaha berskala mikro dan kecil, semakin tinggi tingkat aktivitas kewirausahaan pada suatu wilayah. Kondisi tersebut memberikan pengaruh positif berupa terciptanya kesempatan kerja baru, peningkatan produktivitas, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

b. Teori Pembangunan Ekonomi dan UMKM

Teori pembangunan ekonomi menyoroti upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan kualitas hidup. Todaro (2000) menjelaskan bahwa pembangunan tidak semata-mata diukur dari kenaikan pendapatan per kapita, tetapi juga dari kemampuan suatu negara dalam menyediakan lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan. Dalam konteks tersebut, UMKM menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi di tingkat daerah. Banyaknya unit UMKM mencerminkan tingginya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi produktif, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan membantu mengurangi ketimpangan antarwilayah. Menurut Harahap et al (2025) juga menyatakan bahwa UMKM memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta mempunyai peran penting dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan di mana kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa bagi masyarakatnya mengalami peningkatan secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu (Arsyad, 2018).

Menurut Sukirno (2016), pertumbuhan ekonomi dapat dimaknai sebagai proses perubahan kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang ditandai dengan meningkatnya hasil produksi masyarakat, sehingga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan mereka. Dengan kata lain, bertambahnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat yang kemudian mendorong kemakmuran disebut sebagai pertumbuhan ekonomi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi mencerminkan seberapa besar aktivitas ekonomi mampu menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat dalam periode tertentu. Secara umum, kegiatan ekonomi merupakan proses pemanfaatan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan output, yang selanjutnya memberikan imbalan kepada pemilik faktor-faktor produksi tersebut. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga ikut meningkat. Singkatnya, pertumbuhan ekonomi menggambarkan perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu nilai pasar total dari seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu perekonomian selama periode tertentu, umumnya satu tahun (Sukarno

dan Rapanna, 2017).

Secara garis besar, teori pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Dalam pandangan klasik, analisis pertumbuhan ekonomi didasarkan pada keyakinan terhadap kemampuan serta efisiensi mekanisme pasar bebas. Teori ini dikembangkan oleh para ekonom klasik terkemuka, seperti Adam Smith dan David Ricardo.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai meningkatnya kemampuan suatu negara atau daerah dalam menghasilkan barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama yang digunakan untuk menganalisis sejauh mana proses pembangunan ekonomi berlangsung di suatu negara. Indikator ini mencerminkan tingkat peningkatan aktivitas ekonomi yang berujung pada bertambahnya pendapatan masyarakat dalam periode tertentu.

2.1.3.2 Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan kenaikan PNB atau PDB riil antartahun. Untuk mengukur perkembangannya setiap periode, digunakan rumus berikut (Diyanti, 2022):

$$LPE_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100 \%$$

Keterangan:

LPE_t = Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun t

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto Riil tahun t

$PDRB_{t-1}$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya (t-1)

2.1.3.3 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan teori Adisasmita (2013), indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah meliputi:

a. Ketidakseimbangan Pendapatan

Dalam kondisi ideal, distribusi pendapatan absolut akan membuat 80% populasi terbawah menerima 80% total pendapatan, sementara 20% teratas mendapat 20%. Ketimpangan ini menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi.

b. Perubahan Struktur Perekonomian

Pembangunan ekonomi di masyarakat maju mendorong transformasi struktural: kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cenderung menurun, sedangkan sektor industri meningkat. Industri berperan krusial dalam pembangunan nasional/regional melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan perolehan devisa dari ekspor (Adisasmita, 2013).

c. Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Permasalahan ketenagakerjaan dan lowongan pekerjaan bersifat strategis dan mendesak di Indonesia. Dengan populasi >240 juta jiwa, tingkat pengangguran yang tinggi terus meluas akibat krisis finansial global. Penanganan krisis ekonomi ini memerlukan intervensi pemerintah.

d. Tingkat dan Penyebaran Kemudahan

Kemudahan merujuk pada akses masyarakat memenuhi kebutuhan hidup (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, ibadah, rekreasi) maupun

kebutuhan usaha (bahan baku, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa pendukung.

2.1.3.4 Teori Okun' Law

Teori Okun's Law pertama kali dikemukakan oleh Arthur M. Okun (1962) yang menjelaskan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Artinya, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka tingkat pengangguran akan menurun, dan sebaliknya. Dalam perspektif makroekonomi, peningkatan output riil atau Produk Domestik Bruto (PDB) akan mendorong permintaan tenaga kerja, sehingga mengurangi jumlah penganggur di pasar kerja.

Menurut Astari dkk (2019), hukum ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka. Artinya, ketika perekonomian mengalami peningkatan output, maka tingkat pengangguran cenderung menurun. Arthur Okun mengemukakan hubungan tersebut berdasarkan pengamatannya bahwa peningkatan produksi barang dan jasa akan mendorong permintaan terhadap tenaga kerja. Dengan demikian, semakin tinggi aktivitas produksi, semakin besar pula kebutuhan perusahaan untuk menambah jam kerja atau merekrut tenaga kerja baru sebagai bagian dari total angkatan kerja yang dibutuhkan (Mankiw, 2018). Secara umum, hubungan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$\Delta U_t = \alpha + \beta \left(\frac{\Delta Y_t}{Y_{t-1}} \right)$$

Keterangan:

ΔU_t = Perubahan tingkat pengangguran pada tahun ke- t

α = Konstanta

$\frac{\Delta Y_t}{Y_{t-1}}$ = Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun ke-t

β = Koefisien Okun (Perubahan tingkat pengangguran yang disebabkan oleh perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi)

Menurut teori ini, setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% di atas tingkat pertumbuhan potensial akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar $\beta\%$. Dengan kata lain, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin rendah tingkat pengangguran yang terjadi, asalkan peningkatan tersebut disertai dengan ekspansi sektor-sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja.

2.1.4 Upah Minimum Provinsi

2.1.4.1 Pengertian Upah Minimum Provinsi

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, yang dimaksud dengan upah minimum adalah upah bulanan terendah yang mencakup upah pokok serta tunjangan tetap. Selanjutnya, Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pemerintah, dalam hal ini gubernur, menetapkan besaran upah minimum dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau bupati/wali kota.

Penetapan tersebut didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ketentuan mengenai penghasilan layak, kebijakan pengupahan, serta perlindungan terhadap hak upah pekerja diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah (Hardijan Rusli, 2011:91).

Upah minimum ditetapkan dengan tujuan untuk mencapai tingkat Kebutuhan Hidup Layak (KHL), di mana setiap penetapan upah minimum harus memperhatikan tahapan pencapaian perbandingan antara besaran upah minimum dan kebutuhan hidup layak sebagaimana ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja. Proses penyesuaian tersebut dilakukan secara bertahap karena tingkat kebutuhan hidup minimum sangat bergantung pada kemampuan dunia usaha (Hardijan Rusli, 2011:91). Menurut Hardijan Rusli (2011) Jenis upah minimum dapat dibedakan menjadi:

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi.
- b. Upah minimum berdasarkan wilayah kabupaten/kota

Upah yang diterima pekerja memiliki peran yang sangat penting dalam menopang kelangsungan hidup dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Melalui pendapatan upah, seseorang dapat mewujudkan cita-cita sekaligus memperbaiki taraf hidup yang lebih layak dan manusiawi. Besaran upah yang diterima umumnya dipengaruhi oleh kemampuan serta keahlian yang dimiliki oleh pekerja.

Menurut Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah merupakan hak pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan

perjanjian kerja, kesepakatan bersama, atau peraturan perundang-undangan, yang mencakup tunjangan bagi pekerja maupun keluarganya sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan diberikan.

Ketentuan upah dapat didasarkan pada perjanjian kerja sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika terjadi pertentangan, maka ketentuan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, upah minimum sektoral juga dapat ditetapkan untuk kelompok bidang usaha tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan Lapangan Usaha Indonesia, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, lintas provinsi, maupun nasional. Namun demikian, besaran upah minimum sektoral tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional di wilayah yang bersangkutan.

Penetapan upah minimum harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999, dasar pertimbangan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) meliputi:

1. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)
2. Indeks Harga Konsumen (IHK)
3. Kemampuan, perkembangan, dan kelangsungan perusahaan
4. Tingkat upah umum yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah
5. Kondisi pasar tenaga kerja, serta
6. Perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa upah minimum merupakan bentuk kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja, dengan nilai minimal yang telah diatur oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan standar kebutuhan hidup layak.

2.1.4.2 Komponen Upah

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, komponen upah terdiri atas beberapa unsur yaitu:

a. Upah Pokok

Upah pokok merupakan imbalan dasar yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan tingkat jabatan atau jenis pekerjaan tertentu, yang besarnya telah ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja.

b. Tunjangan Tetap

Tunjangan tetap adalah pembayaran yang diberikan secara berkala kepada pekerja maupun keluarganya, baik secara langsung maupun tidak langsung, namun tidak selalu dibayarkan bersamaan dengan upah pokok.

2.1.4.3 Jenis – Jenis Upah

Menurut Kartasapoetra, jenis-jenis upah dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama, yaitu:

a. Upah Normal

Upah normal merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja secara tunai sebagai kompensasi atas jasa atau tenaga yang diberikan sesuai

perjanjian kerja. Upah ini tidak mencakup tambahan atau keuntungan lain, sehingga sering disebut sebagai upah nominal atau money wages karena seluruhnya berbentuk uang.

b. Upah Nyata (Real Wages)

Upah nyata adalah upah yang benar-benar diterima pekerja setelah mempertimbangkan daya beli terhadap kebutuhan hidup. Besarnya upah nyata dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu jumlah pendapatan yang diterima dan tingkat biaya hidup Simanjuntak (2001). Dalam beberapa kondisi, upah dapat diterima dalam bentuk uang maupun barang (*in natura*), sehingga nilai upah nyata merupakan penjumlahan dari keduanya.

c. Upah Hidup

Upah hidup adalah tingkat pendapatan yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih luas, tidak hanya kebutuhan pokok, tetapi juga kebutuhan sosial seperti pendidikan anak, asuransi, dan konsumsi pangan bergizi.

d. Upah Minimum

Upah minimum merupakan bentuk perlindungan pemerintah bagi pekerja agar memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) dan kondisi ekonomi nasional. Upah minimum juga menjadi sarana menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.

e. Upah wajar

Upah Wajar adalah tingkat kompensasi yang dinilai adil oleh kedua belah pihak, baik pengusaha maupun pekerja, sebagai imbalan atas jasa yang diberikan

sesuai perjanjian kerja.

2.1.4.4 Teori Keynes

John Maynard Keynes dalam karya klasiknya *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936). Dalam pandangannya, pengangguran tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme pasar tenaga kerja yang menyesuaikan tingkat upah. Keynes menolak gagasan kaum klasik yang meyakini bahwa penurunan upah akan secara otomatis meningkatkan permintaan tenaga kerja dan menghapus pengangguran. Sebaliknya, Keynes menegaskan bahwa penurunan upah nominal justru menurunkan pendapatan riil masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi daya beli dan menekan permintaan agregat terhadap barang dan jasa. Akibat berkurangnya permintaan tersebut, perusahaan akan mengurangi kapasitas produksinya, sehingga pengangguran malah meningkat. Oleh karena itu, dalam pandangan Keynes, pengangguran tidak terjadi karena tingkat upah yang terlalu tinggi, melainkan akibat lemahnya permintaan agregat dalam perekonomian.

Lebih lanjut, Keynes memperkenalkan konsep pengangguran involunter (involuntary unemployment), yaitu kondisi di mana tenaga kerja bersedia bekerja dengan tingkat upah yang berlaku, tetapi tidak memperoleh pekerjaan karena kurangnya permintaan terhadap barang dan jasa Keynes (1936) dalam Syukriansyah, D.dkk (2024). Pandangan ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja tidak selalu fleksibel, sebab tingkat upah bersifat kaku atau sulit menyesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi. Kekakuan upah ini dikenal dengan istilah sticky wages, yang membuat proses penyesuaian pasar tenaga kerja tidak berjalan secara sempurna.

Pemikiran Keynes tersebut didukung oleh penelitian Blanchard dan Katz (1999) dalam Setyaputri, N.A.dkk (2025). yang menemukan bahwa kekakuan upah nominal merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pengangguran jangka panjang. Menurut mereka, meskipun produktivitas pekerja menurun, perusahaan cenderung enggan menurunkan upah karena alasan moral, motivasi, serta pertimbangan kontraktual. Dengan demikian, mekanisme pasar tenaga kerja tidak bekerja secara otomatis sebagaimana diasumsikan oleh teori ekonomi klasik.

Dalam konteks Indonesia, Tambunan (2006) menjelaskan bahwa kebijakan upah minimum yang terlalu kaku dapat memperparah pengangguran, terutama di sektor padat karya yang sensitif terhadap biaya tenaga kerja. Namun, dari sudut pandang Keynesian, mempertahankan daya beli masyarakat melalui kebijakan upah juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas permintaan agregat dan mencegah perekonomian jatuh ke dalam resesi. Oleh sebab itu, kebijakan pengupahan perlu diseimbangkan dengan kebijakan fiskal dan moneter yang mampu mendorong konsumsi dan investasi agar perekonomian tetap tumbuh dan kesempatan kerja meningkat.

2.1.5 Pendidikan

2.1.5.1 Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Melalui

pendidikan, peserta didik diharapkan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemampuan pengendalian diri, kepribadian yang baik, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU No. 20 Tahun 2003).

Menurut Notoatmodjo (2017:16) Pendidikan adalah proses yang dirancang secara sistematis untuk memengaruhi individu, kelompok, maupun masyarakat agar mereka dapat bertindak sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pendidik. Sementara itu, Sastrohadiwiryo (2019) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan upaya untuk memperbaiki kepribadian serta mengembangkan kualitas dan keahlian manusia, baik secara jasmani maupun rohani, yang berlangsung sepanjang hayat, baik di lingkungan formal maupun nonformal, guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan seimbang.

Secara umum, tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan manusia Indonesia secara utuh. Hal ini mencakup pembentukan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpengetahuan dan berketerampilan, sehat jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa.

Dari pengertian tersebut, terlihat jelas bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pembangunan di bidang pendidikan, bangsa dapat memperkuat proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, pendidikan merupakan faktor utama dan

kunci keberhasilan dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul (Mahsunah, 2020).

2.1.5.2 Tujuan Pendidikan

Menurut Illich (2018) mengemukakan bahwa sistem pendidikan yang ideal harus memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memberikan kesempatan bagi setiap individu yang ingin belajar untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia kapan pun dalam perjalanan hidupnya. Kedua, memberikan ruang bagi siapa pun yang ingin berbagi pengetahuan agar dapat menemukan orang yang ingin belajar dari mereka.

Sedangkan Menurut Dewey (2019), tujuan pendidikan adalah membentuk manusia agar menjadi warga negara yang baik. Oleh karena itu, sekolah berperan mengajarkan berbagai hal yang dibutuhkan peserta didik dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Anak perlu dididik agar mampu mengikuti arahan sekaligus memiliki kemampuan untuk memimpin, serta menguasai keterampilan dalam bidang tertentu seperti teknik, industri, dan sebagainya.

2.1.5.3 Indikator Pendidikan

a. Melek Huruf

Melek huruf atau melek aksara adalah kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Kemampuan ini menjadi dasar penting bagi keberlangsungan dan kemajuan kehidupan masyarakat. Dalam dunia pendidikan, membaca merupakan kegiatan utama yang menjadi pusat dari seluruh proses pembelajaran. Melalui kebiasaan membaca, individu dapat memperluas wawasan dan mengikuti

perkembangan ilmu pengetahuan serta perubahan sosial yang terjadi.

b. Rata-rata Lama Sekolah

Sistem pendidikan nasional perlu mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar semakin banyak warga negara yang memperoleh pendidikan layak, sehingga kualitas sumber daya manusia meningkat. Namun, perlu diiringi dengan jaminan mutu dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan dunia kerja. Upaya perluasan akses pendidikan harus diikuti dengan peningkatan kompetensi lulusan dan pemerataan kesempatan belajar.

Tingginya angka rata-rata lama sekolah mencerminkan jenjang pendidikan yang telah atau sedang ditempuh oleh seseorang. Semakin tinggi angka tersebut, semakin tinggi pula tingkat pendidikan yang berhasil diselesaikan. Salah satu indikator penting untuk menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat adalah rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, yang mencerminkan rata-rata jumlah tahun efektif bersekolah yang ditempuh oleh penduduk suatu wilayah.

2.1.5.4 Teori Human Capital

Teori Modal Manusia yang dikemukakan oleh Gary Becker (1962) dalam Matache,I. (2023) menjelaskan bahwa pendidikan sebagai suatu bentuk investasi jangka panjang yang melekat pada individu, yang dikenal sebagai human capital. Melalui proses pendidikan, individu mengalami peningkatan kualitas diri berupa pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi kerja yang berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja di pasar kerja.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut mendorong individu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan.

Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan pasar kerja juga semakin meningkat, sehingga risiko terjadinya pengangguran dapat diminimalkan. Oleh karena itu, pendidikan sebagai komponen utama dalam human capital memiliki peran strategis dalam menurunkan tingkat pengangguran melalui peningkatan daya serap tenaga kerja dan efisiensi penggunaan faktor produksi tenaga kerja.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Penelitian-penelitian terdahulu ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun kajian terhadap peneliti yang dilakukan penulis, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti Tahun, Tempat peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Analisis Pengangguran Terbuka di Indonesia (2023) Nicko Abdul Rahman & Novya Zulfa Riani	- TPT – Pendidikan	- Variabel ketimpangan	Secara parsial pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran	Kajian Ekonomi dan Pembangun an (SINTA 2), Vol. 5 No. 3, 43– 50
2	<i>Analysis of the Effects of Economic Growth, Minimum Wages, and Education on Unemployment in Indonesia 2014</i> 2023 (2025) Habibie M.F. & Suman A.	- TPT - Pendidikan - Pertumbuhan ekonomi – UMP	- Tambahan variabel ketimpangan	Pendidikan berpengaruh negatif signifikan, Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan, UMP berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran	Journal of Developme nt Economics and Social Studies (JDESS), Vol. 4 No. 3, 45–60
3	Analisis Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka di 38 Provinsi Periode 2021–2025 Hatma A. Rahmah,	- TPT - Pertumbuhan ekonomi	Fokus pada proyeksi	TPT diproyeksikan menurun secara nasional Ketimpangan spasial tetap signifikan terhadap pengangguran	Journal Social Society (SINTA 2), Vol. 5 No. 1, 1–15

No	Judul, Peneliti Tahun, Tempat peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Tamamudin & Ayatullah Sadali (2025)				
4	Pengaruh Pendidikan, UMP, Inflasi, dan Investasi terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia Minar A. & Rohayana S. (2024)	- TPT - Pertumbuhan ekonomi - UMP – Pendidikan	Variabel tambahan inflasi & investasi	Pendidikan negatif signifikan; UMP positif signifikan; Inflasi positif signifikan; Investasi negatif signifikan terhadap pengangguran	Jurnal Ekonomi Integra, Vol. 15 No. 2, 143–152
5	<i>Determinants of Open Unemployment in Indonesia</i> Bayu Dalang Pamungkas & Metasari Kartika (2025)	-Pertumbuhan ekonomi	-investasi	Secara parsial pertumbuhan ekonomi dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran	Jurnal Ekonomi Integra, Vol. 15 No. 2, 145–156
6	<i>Impact of Economic Growth, Wages, and HDI on Educated Unemployment</i> Karlina R. & Hafidh A. (2023)	-Pertumbuhan ekonomi - UMP	Variabel HDI	Pertumbuhan ekonomi negatif signifikan; Upah positif signifikan; HDI negatif signifikan terhadap pengangguran	Journal of World Science, Vol. 2 No. 10, 88–102

No	Judul, Peneliti Tahun, Tempat peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
7	<i>Effect of Economic Growth on Unemployment Rate in Indonesia</i> Alрахman D. et al. (2021)	-Pertumbuhan ekonomi - UMP - TPT	- Pertumbuhan penduduk - Investasi asing – IPM	Pertumbuhan ekonomi negatif signifikan; UMP positif signifikan terhadap pengangguran	BIRCI Journal, Vol. 4 No. 3, 512–523
8	Industri Kecil dan Menengah terhadap Pengangguran Terbuka di Malang Ramantyo B. & Bintoro N.S. (2021)	- Industri mikro kecil - TPT - UMP	Variabel pendidikan	Industri mikro kecil negatif signifikan terhadap pengangguran	Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB, Vol. 9 No. 1, 77–89
9	Jumlah Industri, UMP, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran Jawa Barat Aziz A.A. et al. (2020)	- Industri mikro kecil - UMP - Pertumbuhan ekonomi - TPT	Variabel pendidikan	Industri negatif signifikan; UMP positif signifikan Pertumbuhan ekonomi negatif signifikan terhadap pengangguran	Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 20 No. 3, 101–115
10	Analisis Pengangguran Terbuka di Indonesia Rahman N.A. & Riani N.Z. (2023)	- TPT - Pendidikan	Variabel ketimpangan	Pendidikan negatif signifikan; Ketimpangan positif signifikan terhadap pengangguran	Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 5 No. 3, 43–50

No	Judul, Peneliti Tahun, Tempat peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
11	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten 2020–2023 Lestari I.D. et al. (2024)	- UMK - TPT	Jumlah penduduk & jumlah industri mikro kecil	UMK signifikan menurunkan pengangguran; TPAK & jumlah penduduk tidak signifikan terhadap pengangguran	Independent Journal of Economics, Vol. 4 No. 3, 1–10
12	Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gresik Eryan Okky Tegar Adinda & Kiki Asmara (2024)	- TPT - UMP - Pertumbuhan ekonomi - Pendidikan	Variabel jumlah industri mikro kecil	UMP negatif signifikan; Pertumbuhan ekonomi negatif signifikan; Pendidikan positif signifikan terhadap pengangguran	Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi, Vol. 8 No. 2, 2549-2284
13	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Industri dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten	- Pertumbuhan ekonomi - Pendidikan - Industri mikro kecil	Variabel UMP	Pertumbuhan ekonomi negatif signifikan; Industri positif namun tidak signifikan; Pendidikan negatif tidak signifikan terhadap pengangguran	JPEK, Vol. 8 No. 2, 668–677

No	Judul, Peneliti Tahun, Tempat peneliti Sidoarjo	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Asmara Septiana (2024)				
14	Pengaruh Angkatan Kerja, Pendidikan, Upah Minimum, dan PDB terhadap Pengangguran di Indonesia Pasuria & Triwahyuningtyas (2022)	- Pendidikan - UMP - TPT	Variabel angkatan kerja & PDB	Angkatan kerja, pendidikan, dan UMP berpengaruh signifikan terhadap pengangguran	SIBATIK Journal, 1(6), 795– 808
15	Studi Regional atas Relasi Ekonomi, Kesejahteraan, dan Upah terhadap Pengangguran di Lima Provinsi Indonesia (2021– 2024) Farid Ardhy Sudirman dkk. (2025)	- Pertumbuhan ekonomi - UMP - TPT - Pendidikan - Jumlah industri mikro kecil	Kesejahteraan	Pertumbuhan ekonomi signifikan menurunkan pengangguran UMP & IPM tidak signifikan Pendidikan dan jumlah industri mikro kecil positif namun tidak signifikan terhadap pengangguran	Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen & Akuntansi (JEBMA), Vol. 5 No. 2, 2025

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Siyogono (2022), kerangka pemikiran merupakan model koseptual yang menunjukkan bagaimana teori-teori berhubungan dengan faktor-faktor yang

diidentifikasi sebagai masalah penting. Agar mempermudah penulis dalam penelitian, maka kerangka berpikir untuk menjelaskan hubungan Pengaruh Jumlah Industri Mikro kecil, Laju Pertumbuhan Ekonomi, UMP dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka 2010-2024 dari 10 Provinsi di Indonesia.

2.3.1 Hubungan Jumlah Industri Mikro Kecil Terhadap Pengangguran

Industri mikro dan kecil berhubungan erat dengan keberadaan pekerja informal karena sektor ini menjadi wadah utama penyerapan tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal, sehingga berkontribusi dalam menekan pengangguran terbu

Menurut Badan Pusat Statistik (2024), industri mikro dan kecil (IMK) sebagian besar bersifat padat karya, menggunakan modal terbatas, serta memanfaatkan tenaga kerja dari anggota keluarga atau komunitas lokal, sehingga banyak pekerja informal terserap di dalamnya, dapat dijelaskan melalui teori kewirausahaan Schumpeter (1947) dalam Rijal Assidiq Mulyana (2023) tentang *creative destruction*, yang menekankan bahwa wirausahawan menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan usaha baru sebagai sumber lapangan kerja. Dalam perspektif pembangunan ekonomi, sektor informal termasuk industri mikro dan kecil berfungsi sebagai penampung tenaga kerja surplus dan alternatif penghasilan masyarakat. Pertumbuhan sektor ini menghasilkan *multiplier effect* terhadap sektor pendukung sehingga berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran.

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan hasil yang konsisten terkait peran UMKM dalam menekan tingkat pengangguran melalui peningkatan kapasitas penyerapan tenaga kerja.

Menurut Supandi dkk (2022) melalui penelitiannya mengenai perkembangan UMKM di Provinsi Jawa Barat menemukan bahwa peningkatan aktivitas UMKM berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, yang mengindikasikan bahwa semakin berkembang sektor UMKM, maka semakin rendah tingkat pengangguran di wilayah tersebut. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rizal dan Mustapita (2024) di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah unit usaha kecil dan menengah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Lubis dan kolega (2024) yang menyatakan bahwa UMKM memiliki fungsi strategis dalam mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti berpendapat bahwa dinamika hubungan antara jumlah industri mikro dan kecil dengan tingkat pengangguran tidak dapat dilepaskan dari karakter komunitas yang secara turun-temurun membangun kultur kewirausahaan berbasis lokal, di mana kekuatan utama terletak pada kemampuan mereka tumbuh dari jejaring sosial masyarakat sehingga membentuk perusahaan kecil yang tangguh menghadapi tekanan pasar, dalam konteks ini, industri mikro dan kecil berkembang subur karena ditopang solidaritas komunitas, keterampilan tradisional, serta kebutuhan ekonomi setempat, yang pada gilirannya mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan dan berkontribusi langsung pada penurunan tingkat pengangguran di wilayah tersebut.

2.3.2 Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama untuk

menilai keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dalam teori ekonomi klasik, seperti yang dikemukakan oleh Okun (1962) melalui Okun's Law dalam Pasaribu (2023), terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, di mana setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat pengangguran karena meningkatnya aktivitas produksi dan permintaan tenaga kerja. Pandangan ini diperkuat oleh teori Keynesian yang menekankan pentingnya permintaan agregat dalam mendorong ekspansi output dan penyerapan tenaga kerja.

Menurut Kurniawan dan Hidayat (2021), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa selama periode tertentu, yang biasanya tercermin dari kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB). Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka menggambarkan persentase tenaga kerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperoleh kesempatan kerja. Menurut Sari dan Prasetyo (2022) menegaskan bahwa pengangguran terbuka merupakan persoalan serius dalam pembangunan ekonomi karena menandakan adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan permintaan tenaga kerja di pasar. Dengan demikian, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka dapat dilihat dari bagaimana peningkatan kegiatan ekonomi mendorong penyerapan tenaga kerja sehingga mampu menurunkan angka pengangguran.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umehata et al. (2025) yang menyatakan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka. Melalui pendekatan kuantitatif dengan

data panel dari beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% berpotensi menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga 0,3%. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal dan investasi publik memiliki peran krusial dalam memperkuat dampak positif pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka pengangguran. Dengan demikian, stabilitas ekonomi makro yang disertai pengelolaan tenaga kerja yang efektif dapat menjadi kunci dalam mengatasi pengangguran terbuka di negara berkembang.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki peranan yang sangat penting dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Ketika perekonomian tumbuh, aktivitas produksi di berbagai sektor meningkat, sehingga kebutuhan tenaga kerja juga bertambah. Dengan demikian, semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, semakin besar pula peluang terciptanya lapangan kerja baru.

Namun, peneliti juga melihat bahwa hubungan ini tidak selalu bersifat otomatis jika pertumbuhan ekonomi tidak diiringi pemerataan sektor produktif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka penyerapan tenaga kerja dapat menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, bagi Indonesia, kebijakan pembangunan ekonomi perlu diarahkan tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan PDB semata, tetapi juga untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif dan mampu mengurangi pengangguran secara berkelanjutan.

2.3.3 Hubungan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan standar upah bulanan paling

rendah yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja di suatu provinsi. Dalam teori pasar tenaga kerja neoklasik, peningkatan upah minimum dapat memengaruhi keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ketika upah minimum ditetapkan di atas tingkat upah keseimbangan pasar, maka sebagian perusahaan, terutama yang beroperasi dengan margin keuntungan rendah, akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang diserap, sehingga dapat meningkatkan tingkat pengangguran (Stigler, 1946) dalam Raharjo (2024) yang menegaskan bahwa kebijakan upah minimum di Indonesia masih menghadapi tantangan besar karena 47,13% pekerja menerima upah di bawah UMP. Namun, teori Keynesian berpendapat bahwa kenaikan upah minimum justru dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong permintaan agregat, dan pada akhirnya menumbuhkan lapangan kerja baru melalui efek multiplier.

Penetapan UMP dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja agar memperoleh penghasilan yang layak. Dalam proses penetapannya, pemerintah mempertimbangkan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tingkat inflasi, serta pertumbuhan ekonomi daerah. UMP berlaku bagi seluruh kabupaten dan kota di dalam satu provinsi dan setiap tahun ditetapkan melalui keputusan gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan.

Menurut Sebayang dan Baihawafi (2023) menjelaskan bahwa UMP merupakan salah satu instrumen kebijakan ekonomi yang berfungsi untuk melindungi pekerja dari praktik eksploitasi serta menjamin taraf hidup minimum. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, UMP tidak hanya berperan sebagai

standar pengupahan, tetapi juga sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam menstabilkan pasar tenaga kerja serta mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiyani dan Astuti (2021) yang menyatakan bahwa perubahan UMP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Peningkatan UMP cenderung menurunkan daya serap tenaga kerja, terutama pada sektor informal, karena kenaikan biaya produksi yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dengan demikian, kebijakan penetapan UMP perlu diseimbangkan agar dapat melindungi pekerja tanpa menekan kesempatan kerja.

Berdasarkan kajian teori dan temuan empiris tersebut, peneliti berpendapat bahwa hubungan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dan tingkat pengangguran bersifat kompleks serta kontekstual. Di satu sisi, peningkatan UMP merupakan langkah penting dalam memastikan keadilan sosial dan perlindungan terhadap pekerja, terutama dalam menghadapi kenaikan biaya hidup. Namun, di sisi lain, kenaikan UMP yang tidak disesuaikan dengan produktivitas tenaga kerja dan kemampuan finansial perusahaan dapat menimbulkan efek negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dalam konteks Indonesia, di mana sebagian besar perusahaan masih didominasi oleh sektor usaha kecil dan menengah, kebijakan kenaikan UMP perlu dilakukan secara bertahap dan berbasis data produktivitas. Dengan demikian, kesejahteraan pekerja dapat meningkat tanpa menimbulkan tekanan berlebih terhadap pasar tenaga kerja dan tanpa memperburuk tingkat pengangguran terbuka.

2.3.4 Hubungan pendidikan Terhadap Pengangguran

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi karena menjadi landasan utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Melalui pendidikan, kemampuan, keterampilan, serta produktivitas tenaga kerja dapat meningkat, yang pada akhirnya mendorong daya saing di pasar kerja. Berdasarkan teori modal manusia (*Human Capital Theory*) yang dikemukakan oleh Becker (1993), investasi pada sektor pendidikan merupakan bentuk upaya strategis untuk memperkuat kapasitas individu dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan berdaya saing tinggi. Dalam konteks ekonomi modern, peningkatan jenjang pendidikan seseorang umumnya berkorelasi negatif dengan tingkat pengangguran, karena individu dengan pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri (Mankiw, 2019).

Temuan penelitian Rahmawati dan Hidayanto (2020) menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah di Indonesia berpengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka, khususnya pada kelompok usia muda.

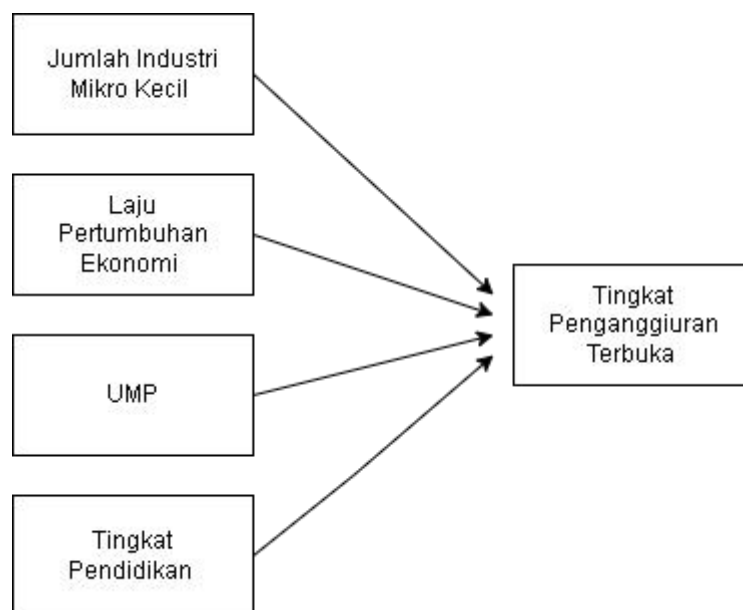
Hasil tersebut diperkuat oleh penelitian Fauzan dan Pratama (2021) yang mengemukakan bahwa peningkatan mutu pendidikan vokasi secara nyata berkontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. Di sisi lain, Nurhaliza dan Taufik (2022) menyoroti adanya ketidaksesuaian antara bidang pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja (*mismatch*) yang menjadi penyebab utama masih tingginya tingkat pengangguran terdidik di Indonesia.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Saragih dan Indrawati (2023) melalui pendekatan data panel di 34 provinsi di Indonesia menemukan bahwa setiap peningkatan 1% pada indeks kualitas pendidikan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga 0,4%. Hasil penelitian serupa oleh Lee dan Park (2024) di kawasan Asia Tenggara juga menunjukkan bahwa pendidikan tinggi dan penguasaan keterampilan digital merupakan faktor penting dalam menekan pengangguran struktural pada era ekonomi berbasis digital. Dengan demikian pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembentukan modal manusia, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menciptakan pasar tenaga kerja yang tanggap terhadap dinamika ekonomi global.

Berdasarkan teori serta bukti empiris yang telah dikemukakan, peneliti berpendapat bahwa pendidikan memiliki hubungan yang erat dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Namun demikian, peningkatan akses pendidikan perlu diimbangi dengan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan industri. Fenomena pengangguran terdidik menandakan bahwa sistem pendidikan formal belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan dunia kerja, terutama dalam hal keterampilan teknis dan digital.

Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa pemerintah perlu memperkuat pendidikan vokasi serta mendorong kolaborasi antara lembaga pendidikan dan sektor industri. Upaya tersebut penting agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan ekonomi modern, sehingga pendidikan dapat berperan

optimal dalam menekan tingkat pengangguran terbuka serta meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini untuk memudahkan dan memperjelas kegiatan penelitian, maka secara sistematis kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan awal atau jawaban sementara yang masih perlu dibuktikan. Disebut sementara karena pernyataan tersebut belum didukung oleh data empiris yang diperoleh melalui proses pengumpulan data (Sugiyono, 2018). Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial Jumlah Industri Mikro Kecil, Laju Pertumbuhan Ekonomi, UMP, Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka 2010-2024 di 10 Provinsi di Indonesia.
2. Diduga secara simultan Jumlah Industri Mikro Kecil, Laju Pertumbuhan

Ekonomi, UMP, Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka 2010-2024 di 10 Provinsi di Indonesia.